

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, sedangkan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dapat terlaksana dengan adanya usaha-usaha kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan tanpa landasan, tujuan dan arah yang jelas tidak akan memperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu di samping kemampuan aparat pemerintah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas dari pembangunan itu diperlukan juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat guna mensukseskan pembangunan itu.

Salah satu unsur yang penting dalam sistem kepegawaian di tanah air adalah keberadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintahan dan juga sekaligus perencana sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pembangunan telah dilaksanakan, namun mengalami hambatan-hambatan yang sangat fatal akibat gejolak-gejolak politik di tanah air.

Berdasarkan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 maka pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap. GBHN adalah cerminan pernyataan kehendak rakyat untuk memberikan arah bagi pembangunan Nasional. Kegiatan pembangunan dilakukan melalui pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta dilaksanakan secara terpadu dan saling mengisi.

Pada hakekatnya fungsi dan peranan pegawai negeri sipil yang dalam skop penelitian ini dibatasi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terutama dalam rangka membangun masyarakat, bagi setiap negara tidak selalu sama. Hal ini tergantung pada beberapa hal pokok antara lain :

“ Pertama adalah falsafah hidup kemasyarakatan dan kedua adalah falsafah politik masyarakat tersebut.“¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah untuk melakukan pencatatan serta administrasi dalam bidang kependudukan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, faktor-faktor sumber daya termasuk manusianya perlu diperhatikan. Sumber daya manusia ini mempunyai

¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974, hal. 17.